

# NKRI DAN PENGUATAN PENDIDIKAN: TINJAUAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Rusydi Sulaiman

Dosen STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
Email: abirusydi@yahoo.co.id

**Abstract:** Indonesia telah memberi apresiasi kepada setiap warga negara, dan menjunjung tinggi hal-hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban warga Negara dalam keseluruhan aspek kehidupan. Satu bidang yang mesti diperkuat dalam rangka menuju stabilitas NKRI adalah pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi setiap manusia, terlebih warga negara di negeri ini, negara dan pemerintahnya, maka pendidikan harus ditumbuh kembangkan secara sistematis oleh para pengambil kebijakan yang berwenang di Republik ini. Pendidikan memiliki peran strategis dalam mempercepat terbentuknya masyarakat berperadaban (civilized-people) atau masyarakat utama (al-Madiinah al-Faadhilah). Artikel ini mempertegas tentang NKRI dan Penguatan Pendidikan yang kaitannya dengan hak dan kewajiban warga negara diharapkan menjadi sebuah penguatan nilai-nilai didalamnya. Pembahasan meliputi beberapa bahasan, yaitu: warga negara dan keharusan pendidikan, aspek pendidikan sebagai langkah peradaban, problematika pendidikan di Indonesia, menjadi civilized-people. Hakikat pendidikan adalah proses pembelajaran yang tidak saja pemberian pengetahuan, melainkan aktivitas untuk membangun kesadaran, kedewasaan dan kemandirian serta pembebasan. Kesadaran, kedewasaan kemandirian, dan pembebasan merupakan tujuan inti pendidikan dan demokrasi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa manusia sebagai pusat pendidikan harus menjadikan program pendidikan sebagai alat pembebasan untuk mengantarkan manusia menjadi makhluk yang bermartabat. Pendidikan dimaksud tidak sebatas al-Ta'lim, melainkan al-Tarbiyah, al-Ta'diib dan juga al-Riyaadhah. Manusia sebagai makhluk beradab tidak lepas dari unsur-unsur yang baik berupa wujud-wujud kebudayaan dan peradaban; idealisme, kelakuan dan wujud benda. Supremasi peradaban sebuah bangsa identik dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi modern.

**Kata kunci:** NKRI, pendidikan, warga negara, hak dan kewajiban

**Abstract:** Indonesia has given an appreciation to every citizen, and upholds the matters relating to the rights and obligations of citizens in all aspects of life. One area that must be strengthened in order to the stability of the Homeland is education. Education is an essential need for every human being, especially the citizens in the country, state and government, the education should be fostered and developed systematically by policy makers that authorities in the Republic. Education has a strategic role in accelerating the formation of civilized societies (civilized-people) or the main community (al-Madiinah al-Faadhilah). This article emphasize on the Homeland and Strengthening Education relation to the rights and obligations of citizens expected to be a strengthening of the values therein. Discussion topics include beberapa, namely: citizens and necessity of education, educational aspects sebagai step of civilization, the problems of education in Indonesia, became civilized-people. The essence of education is learning that not only the provision of knowledge, but rather an activity to build awareness, maturity and independence and liberation. Awareness, maturity independence and liberation is the core purpose of education and democracy. It can be interpreted that the human being as an educational center must make education programs as a means of liberation to drive humans into beings with dignity. Education is not limited to al-Ta'lim, but al-Ta'diib, al-Ta'diib and also al-Riyaadhah. Civilized human beings can not be separated from the elements that either forms of culture and civilization; idealism, behavior and states of matter. The supremacy of civilization of a nation synonymous with the advancement of science and mastery of modern technologies.

**Keywords:** NKRI, education, citizen, rights and obligations

## Pendahuluan

Indonesia merupakan satu dari beberapa negara di Asia Tenggara yang mengadopsi sistem pemerintahan Barat pasca dihapusnya sistem

pemerintahan khilafah Islamiyah tahun 1920 Masehi menjadi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Keberadaan Indonesia sebagai NKRI telah diakui di dunia internasional sejak proklamasi

kemerdekaannya, baik secara de facto maupun yuridis sebagaimana Negara berdaulat lain dengan batas wilayah tertentu.

Sebagaimana negara-negara lainnya, Indonesia memiliki kedudukan yang sama dan disikapi secara sama, disamping sebagai bangsa besar, Indonesia telah memberi apresiasi kepada setiap warga negara, dan menjunjung tinggi hal-hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban warga Negara dalam keseluruhan aspek kehidupan. Bila warga Negara diberi kesempatan, tentu mereka mampu melakukan hal yang terbaik bagi kemajuan bangsa. Baik buruknya sebuah Negara sangat tergantung pada perkembangan dan sejauh mana warga Negara tersebut mendapatkan akses kuat sehingga akan membantu kiprahnya kemudian di tengah masyarakat.

Satu bidang yang mesti diperkuat dalam rangka menuju stabilitas NKRI adalah pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi setiap manusia, terlebih warga negara di negeri ini, negara dan pemerintahnya, maka pendidikan harus ditumbuh kembangkan secara sistematis oleh para pengambil kebijakan yang berwenang di Republik ini.<sup>1</sup> Tak terbantahkan, bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam mempercepat terbentuknya masyarakat berperadaban (*civilized-people*) atau masyarakat atau negara utama (*al-Madiinah al-Faadhilah*). Kebalikannya adalah *al-Madiinah al-Jaahilah* (negara bodoh).

Harapannya, dengan keberadaan pendidikan yang layak bagi seluruh warga Negara akan menjamin kekuatan NKRI menjadi lebih stabil dalam menghadapi tantangan global di era modern ini. Pendidikan dirasa menjadi tolak ukur yang sangat penting bagi kehidupan dan kemajuan NKRI. Begitu banyak tokoh yang menginspirasi bangsa ini untuk menjadi besar dan berenergi dalam melaksanakan tugasnya sebagai warga Negara Indonesia untuk mengenyam pendidikan, karena hal tersebut dirasa sangat penting dan sebuah keharusan bagi setiap warga Negara. Selebihnya warga negara membekali dirinya dengan wujud peradaban dan tetap menjunjung nilai-nilai nasionalisme serta berbuat sebanyak-banyaknya untuk orang lain (*Be useful for all*) sejalan dengan tujuan NKRI.

Namun demikian, statemen positif diatas terkadang tidak mengindikasikan kebaikan. Belakangan ini, begitu banyak permasalahan

di masyarakat, khususnya yang terjadi di dunia pendidikan. Masih banyak warga Negara di negeri ini yang belum mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia dalam hal pendidikan, padahal pendidikan merupakan salah satu indikator penting bagi kemajuan sebuah Negara. Seringkali lembaga pendidikan dijadikan tempat untuk menimbun segudang diskriminasi dan sikap tidak demokratis. Pendidikan yang seharusnya didalamnya memberikan pencerahan, bukan sebaliknya menjadi lembaga yang memutus akses peserta didik dan masyarakat dalam berkarya, dekadensi moral dan semacamnya—meraja lela dimana-mana—mengarah kepada disorganisasi sosial yang sangat meresahkan. Pancasila yang semestinya sebagai penyatu dalam berbangsa dan bernegara kenyataannya dikesampingkan. Pancasila di era Orde Baru sempat menjadi sistemik dan bahkan meng-ideologis dalam jiwa-jiwa bangsa ini, belakangan melemah dan diambangkan. Terkadang falsafah hidup tersebut dirongrong keberadaannya oleh kalangan tertentu.

Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan kembali kepada pilar-pilar kebangsaan dalam wadah Negara NKRI. NKRI dan Penguatan Pendidikan yang kaitannya dengan hak dan kewajiban warga negara diharapkan menjadi sebuah penguatan nilai-nilai didalamnya. Pendidikan di Indonesia yang sudah berada di titik nadir peradaban perlu diarahkan untuk menjadi lebih baik. Jangan sampai pendidikan hanya berpihak kepada orang-orang yang mampu saja dan mengenyampingkan orang-orang miskin. Setiap warga Negara berpotensi menjadi pelopor di negerinya sendiri, ketika potensi-potensi yang ada dalam dirinya bisa dikembangkan untuk kemajuan bangsa ini.

### **Kekuatan NKRI**

Sebelum Indonesia merdeka ternyata Negara ini telah mengalami perjalanan panjang untuk meraih kemenangan. Sejarah perjalanan panjang Bangsa Indonesia dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan, dilanjutkan pada era perebutan dan semangat mempertahankan kemerdekaan hingga era pengisian kemerdekaan; menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamannya. Perbedaan kondisi dan tuntutan tersebut ditanggapi Bangsa Indonesia berdasarkan nilai perjuangan bangsa. Kesamaan nilai-nilai tersebut dilandasi oleh jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan sebagai pondasi kekuatan dalam proses terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

<sup>1</sup> Suyanto dan Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia melalui Milenium III* (Yogyakarta:

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Bangsa yang diakui kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, walaupun sedikit mengalami pergolakan pasca proklamasi. Agresi Belanda I (1947) dan II (1948) merupakan bukti autentik intervensi Imperialis Belanda yang bermaksud mengokohkan kembali kolonialisasinya. PBB pun turun tangan mengakui kedaulatan negeri terbesar di Asia Tenggara ini. Peristiwa tersebut tentu disebabkan oleh perjuangan gigih para pemuda. Mereka benar-benar telah memberikan kontribusi terhadap NKRI dan menggugah pihak luar sehingga tidak semena-mena mencabik-cabik Indonesia yang secara de jure sudah merdeka. Tepatnya pada tahun 1950, berkat Soekarno yang masih muda, negara ini resmi diakui keanggotaannya di organisasi besar dunia, yaitu PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa). Semangat perjuangan Bangsa Indonesia yang gigih dan tidak mengenal lelah serta menyerah terbukti dengan diproklamasikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bukti peran dan kontribusi pemuda dalam bidang pendidikan sebagai bagian dari warga Negara dapat dibuktikan dalam ulasan sejarah Indonesia yang diajarkan di sekolah, madrasah dan pesantren, seperti: adanya. Perhimpunan Indonesia di Belanda (1906), Boedi Oetomo (1908) dan gerakan/ organisasi lainnya sampai munculnya gerakan Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928), Gerakan dan organisasi keagamaan yang dimobilisasi oleh pemuda pesantren dan Islam lokal di awal abad kedua puluh masehi, seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, al-Khairiyat, al-Irsyad, Masyumi, Tarbiyah Islamiyah, Muslimin Indonesia, syarikat Islam. Tak ketinggalan gerakan pemuda non-muslim. Kesemuanya berhubungan dengan upaya terealisasinya kemerdekaan Republik Indonesia yang didorong oleh semangat nasionalisme yang kuat. Tentunya ada landasan kuat yang telah dirumuskan menjelang kemerdekaan.<sup>2</sup>

Secara umum semua pergerakan organisasi yang ada di Indonesia dihadirkan untuk mencapai

kemerdekaan Indonesia, namun kemerdekaan Negara ini juga tak lepas dari kiprahnya para perempuan hebat atau srikandi-srikandi Indonesia yang diprakarsai dalam Kongres Perempuan pertama pada 28 Desember 1928 di Yogyakarta, tahun itu, menandai adanya pergerakan perempuan yang telah memiliki andil dalam penyelenggaraan gerakan wanita pada masa penjajahan, perang kemerdekaan, demokrasi liberal, demokrasi ter-pimpin, pergerakan wanita pada masa orde baru, reformasi hingga tonggak kemerdekaan dipegang penuh oleh Bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 silam. Keseluruhan dokumen telah disimpan di museum monumen kesatuan pergerakan wanita Indonesia.<sup>3</sup> Istilah yang dikutip dari Yudi latif adalah bahwa dasar Negara tidak dipungut dari udara, melainkan digali dari bumi sejarah ke-Indonesiaan yang tingkat penggaliaannya tidak berhenti sampai zaman gelap penjajahan, melainkan menerobos jauh kebelakang hingga zaman kejayaan nusantara terdahulu.<sup>4</sup> Dari dulu hingga sekarang, warga Negara Indonesia telah membuktikan peran mereka demi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui berbagai aspek, hingga semuanya menjadi suatu kekuatan dan karakter tersendiri bagi kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

### Warga Negara dan Kebutuhan Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu keharusan bagi manusia dan berlangsung sepanjang hayat sejak kelahirannya ke dunia, Anak memiliki kebutuhan untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan sangat dibutuhkan oleh setiap manusia agar dapat melakukan aktivitas sosial di masyarakat tempat mereka berada. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan formal di sekolah. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah tidak hanya berfungsi mengembangkan kepribadian.<sup>5</sup> Dan pada bangsa-bangsa yang sudah maju, telah dibuat suatu kebijaksanaan yang diarahkan untuk menciptakan keseimbangan

<sup>2</sup> Dr. Radjiman Wediodiningerat selaku ketua BPUPKI pada 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar Negara Indonesia merdeka. Permintaan itu menimbulkan rangsangan anamnesis. Dia memutar kembali ingatan para pendiri bangsa ke belakang. Hal ini mendorong mereka untuk menggali kekayaan kerohanian, kepribadian, dan wawasan kebangsaan yang terpendam dalam sejarah. Bahan-bahan pemikiran rumusan dasar Negara telah dipersiapkan setidaknya sejak dekade 1920-an; sebuah upaya mensistesisikan aneka Ideologi dan gugus pergerakan dalam rangka membentuk blok nasional demi mencapai kemerdekaan Negara Indonesia. Lihat juga dalam Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, rasionalitas dan aktualitas. Denpasar

<sup>3</sup> Dokumen, "Dokumen Museum Monumen Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia Yogyakarta", Desember 1983, selengkapnya data dapat diakses melalui web [www.pergerakanwanita.museumjogja.org](http://www.pergerakanwanita.museumjogja.org), pada tanggal 16 November 2016.

<sup>4</sup> Yudi Latif, Negara Paripurna., h. 4

<sup>5</sup> Tertuang dalam Undang-Undang (UU) RINomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional BAB II Pasal 3 sebagai berikut: "Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang

perkembangan pendidikan.<sup>6</sup> Hal tersebut dipertegas dengan empat pilar pendidikan berdasarkan ketetapan UNESCO tahun 1997, yaitu: *learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be*. Artinya pendidikan tidak sebatas pembekalan ilmu pengetahuan, melainkan tujuannya lebih mendalam, yaitu penguatan kepribadian individu sebagai warga negara.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang lahir lewat UU No. 20 Tahun 2003 secara tersurat telah disebutkan dengan jelas posisi warga Negara, orangtua, dan pemerintah. Ketiga komponen ini memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Artinya segala yang terkait dengan pendidikan harus diusahakan oleh pemerintah. Mulai dari penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar, bahkan pemerintah memiliki tanggungjawab moral untuk “memaksa” warga negaranya untuk mengenyam pendidikan.

Pendidikan tidak harus berbentuk sekolah. Pendidikan bisa diartikan proses yang tadinya tidak tahu menjadi mengerti, yang sebelumnya tidak bisa menjadi terampil. Lahannya sangat luas, polanya bisa seperti sekolah yang menganut sistem klasikal, kelompok belajar ataupun sejenis kursus, tergantung situasi masyarakat. Adapun masyarakat memiliki tanggungjawab sosial. Artinya tatanan kehidupan menjadi hak sepenuhnya warga negara untuk mengelola sistem sosial termasuk pendidikan orangtua sekalipun. Program wajib belajar senantiasa dilaksanakan dengan sepenuh hati. Tidak harus mengikuti pendidikan di sekolah. Di lembaga pesantren juga proses tersebut dapat dilakukan, karena pemerintah mengakui keragaman model pendidikan yang bertujuan positif.

Terkait dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan proses pembangunan pendidikan, Negara diamanatkan sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, bahwa Negara berkewajiban ....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...

Atas dasar itu dikembangkan pula garis besar kebijakan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan hal-hal berikut:

1. Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan
2. Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
3. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN serta APBD untuk memnuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional
4. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia

Ada beberapa alasan yang memperkuat pandangan bahwa manusia mutlak membutuhkan pendidikan, yaitu: pertama, bahwa kehidupan adalah lingkaran proses untuk memahami sebuah proses, mutlak dibutuhkan pendidikan; kedua, pendidikan membantu manusia melakukan proses penyesuaian diri dengan tuntutan perubahan dan dengan sesuatu yang baru; ketiga, pendidikan membantu melepaskan manusia dari kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan; keempat, pendidikan membantu manusia melakukan proses pembentukan jati diri. Pendidikan dikembangkan melalui proses pembelajaran bermakna yang dilakukan dalam rangka pembentukan kepribadian unggul dan tercapainya titik kesempurnaan kualitas hidup; kelima, pendidikan membantu memecahkan kesenjangan hidup di tengah kompleksitas perubahan; keenam, memasuki era reformasi bangsa Indonesia dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang sangat kompleks, untuk menghindari terjadinya berbagai penyimpangan, dibutuhkan pendidikan; ketujuh, pendidikan membantu manusia memahami arti dan hakikat hidup; kedelapan, pendidikan membantu manusia melakukan proses pematangan kualitas diri menuju terbentuknya kepribadian unggul dan tercapainya titik puncak kesempurnaan diri; kesembilan, Pendidikan membantu menumbuhkan akhlak mulia.<sup>7</sup>

Hakikat pendidikan adalah proses pembelajaran yang tidak saja pemberian pengetahuan, melainkan aktivitas untuk membangun kesadaran, kedewasaan dan kemandirian serta pembebasan. Kesadaran, kedewasaan kemandirian, dan pembebasan merupakan tujuan inti pendidikan dan demokrasi. Dengan demikian, batasan antara pendidikan dan demokrasi terdapat titik temu yang sangat signifikan.

<sup>6</sup> Menteri Pendidikan, Raperintihan, Jepang. (Teluk:

<sup>7</sup> Dedu Mulyasana, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing

Karena itu, pendidikan merupakan arena yang efektif dalam membangun mentalitas dan kultur demokratis berkeadaban. Hal itu sejalan dengan historical mission dan tanggungjawab fundamental dunia pendidikan.<sup>8</sup>

### Aspek Pendidikan Sebagai Langkah Peradaban

Dalam menghadapi pengaruh globalisasi dan menyongsong masa depan yang lebih baik, harus dilakukan perjuangan non-fisik sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan perjuangan yang dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia, sehingga kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran sikap dan perilaku yang cinta tanah air dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah NKRI. Perjuangan non-fisik memerlukan sarana kegiatan pendidikan bagi seluruh warganya melalui pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan fungsi manusia menjadi manusia agar terhindar dari berbagai bentuk penindasan, kebodohan sampai pada ketertinggalan.<sup>9</sup> Hal tersebut dapat diartikan bahwa manusia sebagai pusat pendidikan harus menjadikan program pendidikan sebagai alat pembebasan untuk mengantarkan manusia menjadi makhluk yang bermartabat, atau dengan kata lain pendidikan seharusnya dipandang sebagai alat pencerahan bagi kehidupan umat manusia. Pendidikan dimaksud tidak sebatas al-Ta'lim, melainkan al-Tarbiyah, al-Ta'dib dan juga al-Riyaadhah.

Masing-masing istilah tersebut memiliki stressing makna yang berbeda dan seringkali digunakan sebagai representasi peristilahan untuk pendidikan Islam. Terma al-tarbiyah, di dalam Bahasa Arab dinisbatkan kepada tiga akar kata: 1). Rabba-yarbu-tarbiyah, memiliki makna tambah (zad) dan berkembang (nama).<sup>10</sup> Rabba-yurbi-tarbiyah, memiliki makna tumbuh (nasya'a) dan menjadi besar (tara'ra'a). 3). Rabba- yurabbi-tarbiyah, memiliki makna memperbaiki (aslaha), mengawasi, memelihara, merawat, menunaikan, memperindah, memberi makan, mengasuh, tuan, memiliki, mengatur, dan menjaga kelestarian. Istilah-istilah ini dapat juga dirujuk pada beberapa ayat

al-Qur'an.<sup>11</sup> Terdapat beberapa istilah yang melekat pada kata tarbiyah, yaitu: al-tarbiyah al-Diniyah (pendidikan keagamaan), tarbiyah al-Muslimin (pendidikan orang-orang Islam), al-Tarbiyah fi al-Islam (pendidikan dalam Islam), al-Tarbiyah 'Inda al-Muslimin (pendidikan di kalangan orang-orang Islam) dan al-Tarbiyah al-Islamiyah (pendidikan Islam).<sup>12</sup> Terma tarbiyah juga memiliki makna ganda, yaitu: Pertama, proses transformasi sesuatu sampai pada batas kesempurnaan yang dilakukan tahap demi tahap. Kedua, proses aktualisasi sesuatu yang dilakukan tahap demi tahap sampai pada batas kesempurnaan.

Terma al-ta'lim, seperti pendapat Rasyid Ridha adalah proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan yang jelas,<sup>13</sup> namun proses ini umumnya dilakukan secara bertahap. Dalam al-ta'lim ini lebih ditekankan pada transmisi (tabligh). Hal ini menunjukkan bahwa al-ta'lim hanya mencakup domain kognitif saja. Kata al-Ta'lim cenderung dimaknai proses pengajaran yang disuguhkan kepada anak didik, dan beberapa istilah yang melekat padanya adalah: Ta'lim al-Din (pengajaran agama), al-ta'lim al-diny (pengajaran keagamaan), dan al-Ta'lim al-Islamy (pengajaran keislaman).<sup>14</sup> Para ahli pendidikan memang lebih menyoroti dua terma diatas yaitu tentang aspek perbedaan keduanya atau antara pendidikan dan pengajaran.<sup>15</sup>

Adapun term al-ta'dib adalah pengenalan secara berangsur-angsur dan ditanamkan kepada

<sup>11</sup> QS. al-Isra': 24, QS. al-Syu'ara': 18, dan QS. al-Baqarah: 276.

<sup>12</sup> Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002),.h. 36

<sup>13</sup> QS. al-Baqarah: 31.

<sup>14</sup> Muhaimin, Paradigma,.h. 36

<sup>15</sup> Perihal kedua terma tersebut, para ahli berpendapat, yaitu; menurut al-nakhlawy, istilah al-tarbiyah lebih cocok digunakan untuk pendidikan Islam. Berbeda dengan Jalal, istilah al-Ta'lim lebih luas jangkauannya dan lebih umum sifatnya dari al-Tarbiyah. Di kalangan penulis Indonesia, istilah pendidikan biasanya lebih diarahkan pada pembinaan watak, moral, sikap atau keperibadian atau lebih mengarah kepada afektif, sementara pengajaran lebih kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau menonjolkan dimensi kognitif dan psikomotor.. Adapun di kalangan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini istilah pendidikan mendapatkan arti yang sangat luas. Kata-kata pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pelatihan sebagai istilah-istilah teknis tidak lagi dibedakan. Ketiga melebur menjadi satu pengertian baru yaitu pendidikan. Lihat Mochtar Bukhori, Pendidikan Islam di Indonesia Problema Masa Kini dan Perspektif Masa depan, dalam M.Dawam Raharjo (Peng.),Islam Indonesia menatap Masa Depan, (Jakarta: P3M, 1989) Statemen tersebut sesuai dengan undang Undang nomor 2 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 misalnya, dijelaskan bahwa ,”Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau pelatihan bagi peranannya di

<sup>8</sup> Dede Rosyada, dkk, Pendidikan Kewargan (civil education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003),h. 17.

<sup>9</sup> Paulo Freire, Politik Pendidikan Kebudayaan dan Pembebasan, (terjemah: Agung Prihantoro dan Agung Arif Budiatoto), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 12.

manusia mengenai tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan Allah dalam tatanan wujud dan keberadaannya. Al-Attas menganggap tarbiyah adalah tarbiyah Allah, bukan tarbiyah manusia. Ia hanya mengacu kepada kondisi eksistensial yang spesifik karena ditujukan kepada objek-objek pemilihan yang berkaitan dengan jenis relasional, maka tidak sesuai bila dipergunakan sebagai representasi peristilahan pendidikan Islam.<sup>16</sup>

Terma lain yang sepertinya agak asing untuk pendidikan adalah al-riyadah. Terma tersebut oleh al-Ghazali dikedepankan sebagai proses pelatihan individu pada fase kanak-kanak dan lebih mengutamakan sopan santun/ akhlaq (domain afektif) dan pada pengajaran ilmu pengetahuan (domain kognitif) dalam pendidikan anak. Hal ini berbeda dengan proses transformasi ilmu pengetahuan, karena ia mudah diberikan kapan saja tanpa pertimbangan faktor usia anak didik.

Dalam konteks historik-sosiologik, pendidikan Islam pernah dimaknai pendidikan/ pengajaran keagamaan atau keislaman (al-Tarbiyah al-Diniyah, ta'lim al-Din, al-Ta'lim al-Diny, dan al-Ta'lim al-Islami) sebagaimana diurai sebelumnya dalam rangka tarbiyah al-Muslimin (mendidik orang-orang Islam), untuk melengkapi dan /atau membedakannya dengan pendidikan sekuler (non-keagamaan/ non-keislaman). Misalnya adanya sistem pendidikan madrasah diniyah ( sore hari) yang didirikan sebagai wahana penggalian, kajian dan penguasaan ilmu-ilmu keagamaan serta pengamalan ajaran Islam bagi anak didik yang pagi harinya sedang menempuh pendidikan/ sekolah sekuler yang didirikan oleh pemerintah kolonial. at pendidikan, dikemukakan oleh Sastrapratedja dalam Widiastono, pendidikan seharusnya mampu menyiapkan warga Negara menjadi participant aktif dalam pembangunan bangsa dan Negara. Pembangunan bangsa dan Negara disini tidak terbatas pada pemahaman pembangunan dalam arti fisik, melainkan membangun sikap nasionalisme peserta didik yang didalamnya terkandung unsur kewajiban moral untuk meningkatkan diri pada kepentingan yang lebih luas, yaitu bangsa dan Negara.<sup>17</sup> Nilai-nilai pendidikan yang dijadikan dasar atau landasan sebagai aspek penting untuk menuju

Indonesia berkarakter adalah nilai kesadaran, nilai kejujuran, nilai kebenaran, nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keagamaan.

Bila nilai nilai tersebut ditanamkan secara intens dalam diri warga negara, lambat laun penyimpangan-penyimpangan—“Pembodohan Siswa Secara Tersistematis”; adanya manipulasi nilai, guru tidak percaya diri, gaya belajar yang membodohkan siswa, soal ujian yang sama persis dengan soal ujian tahun sebelumnya, pemberian hukuman yang tidak mendidik dan guru yang tidak ideal”.<sup>18</sup> yang selama ini mewarnai bangsa akan terkikis dan berubah menjadi sentuhan pendidikan yang lebih berperadaban.

### Problematika Pendidikan di Indonesia

Dalam proses penguatannya selalu saja muncul masalah atau problem serius yang menghambat intensitas pendidikan dan sudah pasti mengusik bangsa ini. Terdapat empat fakta mengenai problematika pendidikan di Indonesia, meliputi; Fakta pertama, berdasarkan UUD adanya pesan atau perintah UUD untuk “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”, selama 55 tahun telah dibentuk Kementerian khusus pendidikan dan kebudayaan. Namun program-program peningkatan pendidikan nasional selalu saja mengalami perubahan dari waktu ke waktu, “ganti menteri ganti kebijakan”;

Adapun fakta kedua, secara umum tujuan pendidikan nasional sudah baik dan bahkan sangat mulia. Secara institusional pemerintah telah menyiapkan perangkat institusi untuk pelaksanaan program pendidikan tersebut, namun kenyataannya program pemerintah belum maksimal. Masih adanya dikotomi dalam pendidikan dan lemahnya kebijakan Kementerian Pendidikan terhadap lembaga-lembaga keagamaan; Fakta ketiga, fakta penilaian para ahli terhadap hasil atau akibat dari program pendidikan selama 55 tahun setelah proklamasi kemerdekaan.<sup>19</sup>

Beberapa hasil penilaian dari para ahli mengenai program pendidikan tersebut, yaitu; pertama, Negara bangsa Indonesia yang berdiri berdasar cita-cita budaya demokrasi diharapkan akan membawa keadilan dan kemakmuran bagi rakyat, namun yang terjadi setelah abad merdeka bangsa ini tidak semakin cerdas; kedua,

<sup>16</sup> Muhammad Naqib al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1988), 66.

<sup>17</sup> Tosi D. Widiastono, (ed), *Pendidikan Manusia Indonesia*

<sup>18</sup> Joko Susilo, *Pembodohan Siswa Secara Tersistematis*, (Yogyakarta: Pinus, 2007), h.22.

<sup>19</sup> Sindhunata, “Menggagas Paradigma Baru Pendidikan; Demokrasi, Otanepi, Civil Society, Globalisasi” (Yogyakarta:

ironis dan sangat memprihatinkan. Seharusnya sistem pendidikan mampu membebaskan anak-anak menjadi manusia utuh bermartabat, namun kenyataannya menjadi alat penyiksa; ketiga, adanya kondisi dimana sistem pendidikan tergilas oleh kekuatan-kekuatan lain sehingga menghambat tujuan pendidikan nasional; formalitas melampaui hakiki; administrasi mengendalikan kreasi dan semacamnya; keempat, secara spesifik kurikulum pendidikan (kurikulum 1994) tidak berbasis pada tujuan pendidikan nasional yang seharusnya; kelima, Penyelenggaraan pendidikan belum sepenuhnya demokratis. Diperlukan penguatan hubungan antara institusi politik, ekonomi, agama, dan pendidikan yang ideal menuju masyarakat negara yang demokratis.

Beberapa terobosan harus dilakukan dalam proses penguatan pendidikan di negeri ini. Strategi dasar meliputi empat strategi dasar, yakni pertama, pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, kedua, relevansi pendidikan, ketiga, peningkatan kualitas pendidikan, keempat, efisiensi pendidikan.<sup>20</sup> Berdasarkan keempat strategi tersebut secara umum strategi tersebut dibagi menjadi dua dimensi yakni peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Disamping itu juga dalam peningkatan mutu diharapkan dapat memberi peningkatan atas dasar efisiensi, efektivitas dan juga produktivitas pendidikan itu sendiri.

### Menjadi Civilized People

Manusia sebagai makhluk beradab tidak lepas dari unsur-unsur yang baik berupa wujud-wujud kebudayaan dan peradaban; idealisme, kelakuan dan wujud benda. Supremasi peradaban sebuah bangsa identik dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi modern.

Indonesia, pada masa reformasi ini membutuhkan tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani. Kondisi Indonesia yang dilanda euphoria demokrasi, semangat otonomi daerah dan derasnya globalisasi membutuhkan masyarakat yang mempunyai kemauan dan kemampuan hidup bersama dalam sikap saling menghargai, toleransi dalam kemajemukan yang tidak saling mengeklusifkan terhadap berbagai suku, agama, bahasa, dan adat yang berbeda. Kepedulian, kesantunan dan kesetiakawanan merupakan sikap

utama yang sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia.<sup>21</sup>

Dalam menopang peradaban bangsa, kekuatan pendidikan merupakan hal yang utama. Bangsa yang beradab tentunya selalu memberikan space khusus untuk pendidikan. Semakin banyak ruang untuk pendidikan maka semakin tinggi peradaban yang akan diukir. Sebaliknya peradaban yang lemah karena pendidikan tidak mempunyai ruang yang memadai. Oleh karena eratnya kaitan antara kedua hal ini, maka keduanya ibarat dua sisi mata uang. Satu sama lain tidak akan terpisahkan. Maka kita tinggal pilih, apakah akan menjadi al-Madiinah al-Faadhilah atau al-madiinah al-Jaahilah?

Generasi-generasi yang telah mengukir peradaban dalam sejarah manusia, selalu mempunyai nilai-nilai untuk dikagumi. Bahkan tak cukup dikagumi, mereka harus diteladani untuk membangkitkan peradaban manusia kembali. Memunculkan peradaban sebuah Negara dan bangsa menjadi gemilang diantaranya dengan cara membenahi dan memajukan pendidikan. Pola pendidikan yang baik dan terorganisir tak dapat dirumuskan secara sepihak, tapi komprehensif sejalan dengan dinamika sejarah peradaban bangsa. Puncak tertinggi, berapa lama bertahan dan sistem apa yang dipakai adalah hal-hal yang menjadi aspek penilaian untuk memunculkan prototype pendidikan tertentu.

Dengan memahami 3 aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan akan membangun peradaban baru yang sesungguhnya. Dalam setiap aspeknya ia akan menjelaskan tujuan sebuah peradaban, berapa besar pengaruh internal dan eksternal dalam mempertahankan peradaban dan kemudian memberikan kesimpulan pada sistem yang akan dipakai dalam pengelolaan pendidikan. Selanjutnya pendidikan yang demikian mampu memberi efek global dalam pembangunan peradaban. Perlu dicamkan, bahwa peradaban yang maju tidak akan melewatkan generasinya bertahan hidup tanpa sentuhan ilmu pengetahuan.

### Penutup

Mudah-mudah apa yang kita idealisasikan tentang hak dan kewajiban warga Negara dalam pendidikan dapat terealisasikan dengan baik melalui penerapan nilai kesadaran, nilai kejujuran, nilai keadilan, nilai kemanusiaan, nilai keagamaan serta

<sup>20</sup> Wahyudi Noor, Mengusung Konsep Masyarakat Madani Sebagai Paradigma Dalam Strategi Pendidikan, dalam Wahyudi Noor, (Ed.) *Diagama Pendidikan Islam*. (Yogyakarta: IDEA Press

<sup>21</sup> Srijanti, dkk. Pendidikan Kewarganegaraan untuk

keterlibatan warga Negara dalam bela Negara sebagai bentuk penguatan NKRI dalam mewujudkan dan melibatkan warga Negara dalam menjaga stabilitas pendidikan. Karena hal ini merupakan beberapa obsesi besar bagi Negara yang berkarater.

### Daftar Pustaka

- Dokumen, "Dokumen Museum Monumen Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia Yogyakarta", Desember 1983, selengkapnya data dapat diakses melali web [www.pergerakanwanita.museumjogja.org](http://www.pergerakanwanita.museumjogja.org), pada tanggal 16 November 2016.
- Freire, Paulo, 2002, Politik Pendidikan Kebudayaan dan Pembebasan, (terjemah: Agung Prihantoro dan Agung Arif Pudiartato), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hisyam, Djihad, dkk., Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia melalui Milenium III, (Yogyakarta: Adicipta Karya Nusa, 2000)
- Latif, Yudi, 2011, Negara Paripurna; Historisitas, rasionalitas dan aktualitas Pancasila (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Menteri Pendidikan, 1963, Pemerintahan Jepang, Japann's Growth and Education:Tokyo.
- Mulyasana, Dedy, 2011, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Noor, Wahyudin, 2012, Mengusung Konsep Masyarakat Madani Sebagai Paradigma Dalam Strategi Pendidikan, dalam Wahyudin Noor (Ed.), Diorama Pendidikan Islam, Yogyakarta: IDEA Press
- Rosyada, Debe, dkk., 2003, Pendidikan Kewargaan (civil education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Sindhunata, 2000, "Menggagas Paradigma Baru Pendidikan; Demokrasi Otonomi, Civil Society, Globalisasi", Yogyakarta: Kanisius
- Srijanti, dkk., 2003, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiwa, Jakarta: Mercubuana.
- Susilo, Joko, 2007, Pembodohan Siswa Secara Tersistematis, Yogyakarta: Pinus.
- Suparlan, Suhartono, 2008, Filsafat Pendidikan, Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA GROUP.
- Widiastono, Toni D., (ed)., 2004, Pendidikan Manusia Indonesia, Jakarta: Kompas.

